



Critical Review and Analysis of Development Theories: An Anisur Rahman Participatory Action Research Thought

Critical Review dan Analisis Teori Pembangunan: Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan Partisipatori Anisur Rahman

Aldrin Watson Gainau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Univesitas Cendrawasih, Papua, Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:

Theory; Development;
Research; Action.

How to cite:

Gainau, A.W., (2017).
Critical Review dan
Analisis Teori
Pembangunan:
Suatu Pemikiran
Penelitian Tindakan
Partisipatori Anisur
Rahman. *Jurnal Ilmu
Sosial (JIS) Papua*. 4(1):
29 - 42.

ABSTRACT

This article is a critical review of the development theory developed by Anisur Rahman through the study of participatory actions. The review in this article uses a critical review approach. According to Anisur Rahman in the discourse of People Self-Development, capacity building and personality can bring people out of the decline and poverty and develop or build people's economy based on local potential that it has not just imposed a concept, theory or issue thrown the international world without any process of articulation and negotiation first. The theory that became the focus of review is the theory of development. As the results of the study, it was identified that criticism and criticism of the concept of development or modernization continue to be born from scientists or figures who disagree with the concept of development. Anisur Rahman discourse the conception that the alternative paradigm then comes to the belief that development does not always come from the 'top'.

1. Pendahuluan

Pembangunan diri setiap orang harus dimulai dengan pemahaman diri, sebagai pemandu setiap tindakan dan sekaligus merupakan proses karena di dalamnya, ada tindakan dan tinjauan tindakan tersebut. Namun demikian, upaya 'pembangunan' sosial yang sah atau diakui berada di tangan para elit yang menganggap dirinya lebih bijak dari orang lain; yang daripada mencari dan memajukan kemampuan orang-orang memahami diri, malah mempromosikan ide-ide mereka mengenai 'pembangunan'. Para elit menggunakan beberapa cara dalam mempromosikan ide mereka, sembari membawa dunia ke dalam sebuah keadaan suram seperti yang kita rasakan kini. Ini adalah harga yang harus dibayar karena seseorang tidak dapat membangun diri sesuai dengan ide orang lain. Gejala ini juga merupakan salah satu kesalahan intelektual yang paling krusial dalam dunia yang sebaliknya mengupayakan perubahan sosial demi pembebasan orang-orang yang mencoba mengindoktrinir orang-orang dan

memberikan prioritas pada perubahan struktural di atas pembebasan pikiran (*mind*). Hanya dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, yang bebas untuk bertanya, memahami, dan merencanakan apa yang akan diciptakan, perubahan struktural dapat membebaskan orang-orang kreatif. Sehingga, pembebasan pikiran (*liberation of mind*) adalah yang utama, sebelum dan sesudah perubahan struktural (*structural change*).

Pembangunan diri atau *self-development* dapat dimulai bahkan di tempat yang kekurangan sumber daya; yang penting ialah setiap orang memiliki kebebasan berpikir untuk memobilisasi ke arah pencapaian *human dignity* atau martabat manusia dan *self-determination* atau kemampuan menentukan (kebulatan tekad) lewat sebuah proses pengembangan kapabilitas dan personalitas. *Self-development* harus diawali dengan *liberation of mind* yang kemudian akan mengarahkan pada perubahan sosial atau *social change*. Perubahan sosial akan merambat jauh sampai pada peningkatan kesejahteraan hidup (lepas dari *mass poverty* atau kemiskinan) dan rekonstruksi pandangan *consumerist* yang mengatakan bahwa manusia atau orang-orang adalah sekedar konsumen barang-barang dan pelayanan.

Paradigma pembangunan merupakan cara berpikir mengenai bagaimana melihat pembangunan dan bagaimana meneliti dan menilai kebijakan dan gerakan pembangunan. Dalam paradigma pembangunan konvensional, dasar pikiran paradigma tersebut ialah konsep *hierarchical human spectrum* yang di dalamnya terdapat kelas 'superior' yang terqualifikasi untuk memandu, mengontrol, dan menentukan pembangunan orang lain.

Menurut pandangan ini, sebagian negara lebih berkembang dari negara lain; sebagian kelas dalam sebuah negara lebih superior daripada kelas lain dalam hal prestasi, budaya, dan pendidikan. Kelas-kelas superior tersebut kemudian menciptakan atau mengokupasi apa yang sudah ada, dan menyusun sebuah dominasi terhadap 'orang bawahan' atau inferior-secara global, nasional, dan lokal-serta mengambil alih tanggung jawab atas pembangunan mereka (orang bawahan). Kaum intelektual menyusun dominasi tersebut dengan menaksir atau menilai realitas dan mengkonstruksi pengetahuan serta kekuasaan yang kemudian menjadi panduan kebijakan dan aksi kaum intelektual. Tampak jelas paradigm konvensional ini sangat berat sebelah dan berpihak pada kaum superior.

Paradigma alternatif kemudian hadir atas kepercayaan bahwa pembangunan tidak selamanya datang dari 'atas'. Pembangunan yang berarti pembangunan orang dan masyarakat, merupakan proses pertumbuhan kemampuan dan kecakapan secara sehat sekaligus aplikasinya. Proses ini dapat distimulasi dan difasilitasi elemen-elemen eksternal, namun jika ada tendensi untuk menyesuaikan dengan elemen eksternal tersebut, itu hanya akan memotong proses.

Paradigma alternatif pertama ialah 'pembangunan yang endogen' atau *endogeneity of development*; bahwa tidak ada 'front runners' atau orang-orang depan yang harus diikuti. Seseorang dapat saja terkesan dan terinspirasi oleh prestasi orang lain, namun upaya untuk menyamai seseorang itu hanya akan melahirkan 'carbon copy' yang di

dalamnya evolusi kreativitas dan originalitas kehidupan sosial akan hilang. Jika pembangunan itu endogen, maka manusia adalah subjek yang melakukan perlakuan, bukan objek yang menerima perlakuan.

Yang ke-2 ialah 'hubungan manusia yang non-hierarkis' atau *non-hierarchical human relations*; jika di dalam paradigma konvensional manusia dikategorikan sebagai objek pembangunan dan bagi mereka yang tingkat ekonominya di bawah standar yang telah ditetapkan struktur dominan, dikatakan miskin, maka dalam paradigma ini masyarakat tersebut akan diberdayakan sehingga keadaan ekonomi yang ditetapkan akan tercapai.

Yang ke-3 ialah 'generasi dan hubungan pengetahuan' atau *generation and relations of knowledge*; selama ini, dalam masyarakat, dipercayai bahwa mereka yang 'terdidik' (menyelesaikan pendidikan selama sekian tahun di sekolah dan perguruan tinggi) yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan membangun masyarakat. Ini disebut *vertical knowledge relations*. Sebagai kelanjutan dari dua premise sebelumnya, dengan masyarakat yang berpengetahuan, diharapkan masyarakatlah yang menjadi subjek pembangunan, yang mengkonstruksi realitas yang relevan bagi mereka. Pendidikan memang sangat penting, namun bukan berarti bahwa kaum yang menerima pendidikan di sekolah (formal dan informal) sajalah yang berhak menentukan pembangunan.

Premis terakhir yang membentuk paradigma alternatif dalam pembangunan ialah 'membangun dan mempertajam (kemampuan) setiap orang' atau *building and sharpening each other* yang dalam bahasa Afrika bagian timur disebut *uakana* dan *uglolana*; dapat disimpulkan bahwa realitas dalam pembangunan dikonstruksi oleh formal sosial para *grassroots*, bukan berdasarkan pemeriksaan 'top-down' kaum profesional. Namun hal ini tidak menyangkal bahwa pembangunan tetap membutuhkan kontribusi kaum profesional dalam aspek spesifik tertentu. Setiap orang perlu mengetahui posisinya dalam masyarakat dan mengembangkan setiap kapabilitas yang dimiliki untuk mendukung posisi tersebut. *Uakana* dan *uglolana* menekankan pentingnya saling membangun dan mempertajam setiap kapabilitas yang dimiliki setiap orang dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan masyarakat, sehingga dominasi sosial dapat dieliminasi.

2. Pembahasan

Pembangunan atau *development*, merupakan sebuah istilah yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1949 sebagai bentuk kebijakan pemerintah Amerika pasca perang dunia II dalam mengatasi ketertinggalan negara-negara bekas jajahan eropa maupun dalam rangka memperbaiki negara-negara yang dilanda peperangan di negara-negara Eropa Barat & Jepang sebagai pihak yang kalah oleh Amerika dan sekutunya sebagai pihak yang menang. Kebijakan ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk "Penebusan Dosa" dari negara-negara penjajah kepada rakyat di negara-negara jajahannya. Truman dalam pidato kenegaraan yang bernada propaganda mengatakan: "*We must embark on a bold new paradigm for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of*

underdeveloped areas". Secara otomatis, ide pembangunan disebarakan ke seluruh dunia melalui berbagai program pembangunan (Baiquni, 2002; bandingkan Siagian, 2005:6-9).

Selain untuk merekonstruksi negara-negara yang mengalami ketertinggalan, keterpurukan dan kehancuran akibat perang, pembangunan juga merupakan bentuk pertarungan ideologi antara Amerika yang menganut paham kapitalisme melawan negara-negara yang menganut paham sosialisme. Mansour Fakih (2001) dalam bukunya yang berjudul "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi" menguraikan bahwa teori pembangunan, atau yang lebih dikenal dengan paham *developmentalisme*, selain dikembangkan dalam rangka membendung pengaruh dan semangat antikapitalisme bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga, juga merupakan siasat baru untuk mengganti formasi sosial kolonialisme yang baru runtuh. *Developmentalisme* dilontarkan dalam era *perang dingin* untuk membendung sosialisme, sehingga ia merupakan bungkus baru dari kapitalisme.

Lebih lanjut Fakih menguraikan, bagaimana teori sosial pada tahun 1950-an dan 1960-an, memainkan peran penting dalam membangun diskursus akademik yang memberi legitimasi ilmiah terhadap teori tersebut sudah banyak dianalisis. Analisis ditujukan pada suatu kejadian pada tahun 1968 ketika berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu social telah terlibat secara mendalam sampai mempengaruhi kebijakan Amerika tentang *developmentalisme*. Para ahli ilmu-ilmu social tersebut dalam suatu lokakarya tentang "The implementation of Title IX of the Foreign Assistance Act of 1961" berhasil membuat saran kepada pemerintah Amerika Serikat waktu itu yang intinya adalah bagaimana melakukan penaklukan ideologi dan teoretis terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Tugas utama mereka adalah melakukan studi tentang bagaimana kebijakan pemerintah Amerika dalam era *perang dingin* tersebut. Pada akhir pertemuan mereka berhasil melahirkan *the Foreign Assistance Act of 1961*, yang pada dasarnya mencerminkan dominasi interpretasi ilmuwan liberal terhadap konsep *development*. Sejak lokakarya tersebut, para ilmuwan social sangat produktif bahkan berhasil menciptakan pengetahuan dan teori *development* dan modernisasi, sebut saja antara lain Evsey Domar dan Roy Harrod (Harrod-Domar) dengan teori tabungan dan investasi, Walt .W. Rostow dengan Teori Pertumbuhan Tahapan Linear (*linear-stages-of growth- models*), David McClelland yang dikenal dengan teorinya *need for Achievement (n-Ach*, Alex Inkeles dan David H. Smith dengan teori manusia modern atau B. F. Hoselitz dengan teori faktor-faktor Non-ekonomi serta Max Weber dengan teori etika protestan serta para ilmuwan social yang mendukung teori modernisasi lainnya yang terus bermunculan.

Sejak lahirnya konsep *development* dan para ilmuwan menemukan teori modernisasi, ide *developmentalisme* dijadikan agenda oleh Amerika untuk menundukkan negara-negara tertinggal/berkembang yang dikenal dengan sebutan negara-negara Dunia Ketiga melalui kerjasama internasional atau bantuan luar negeri yang merupakan politik luar negeri Amerika untuk memperluas kekuasaan, pasar dan meraih keuntungan sebesar-besarnya demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan negaranya.

Konsep *development* atau modernisasi yang kemudian dianut dan diimplementasikan oleh negara-negara Dunia Ketiga untuk mencapai modernitas dan mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi maupun teknologi. Agar konsep *development* atau pembangunan ini cepat berkembang dan semakin cepat pula diadopsi dan digunakan oleh dunia terutama negara-negara Dunia Ketiga, konsep ini kemudian dijadikan sebagai kajian ilmu pengetahuan di universitas-universitas besar/terkemuka di Amerika, Inggris atau eropa. Selain itu, konsep *development* terus dikembangkan melalui kaum intelektual, teknokrat/birokrat, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga kemanusiaan lembaga-lembaga perguruan tinggi bahkan melalui lembaga-lembaga donor internasional sekelas Bank Dunia dan IMF.

Konsep *development* atau modernisasi sejak digulirkan ke masyarakat internasional, seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman terus mengalami perkembangan dan kemajuan dan melahirkan sejumlah asumsi tentang konsep *development* atau pembangunan. Sebut saja konsep pembangunan yang diusung oleh Harrod-Domar yang melihat pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi yang turut ditentukan pula oleh tingginya tabungan dan investasi (Arief Budiman, 1995:19). Dalam teori Harrod-Domar ini, pembangunan dititikberatkan pada tingginya tabungan dan investasi yang dimiliki oleh suatu negara sebagai dasar atau modal dalam melaksanakan pembangunan. Teori ini berasumsi bahwa, jika suatu negara memiliki modal yang banyak serta mampu melakukan investasi terutama ke negara lain, maka negara tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya jika suatu negara mengalami ketertinggalan, berarti negara tersebut tidak memiliki tabungan atau kekurangan modal sehingga tidak mampu melakukan investasi sehingga negara tersebut gagal dalam mencapai pembangunan ekonominya. Dampak dari konsepsi ini, banyak negara-negara miskin dan berkembang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan tabungannya bahkan sampai melakukan pinjaman atau hutang ke negara-negara maju (Bank Dunia, IMF) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Selain konsepsi atau teori pembangunan yang diutarakan oleh Harrod-Domar, teori yang mampu membius negara-negara Dunia Ketiga (India, Bangladesh, negara-negara Afrika bahkan negara-negara di Amerika Lathin) termasuk menyeret Indonesia dalam paham liberalisme-kapitalisme (Neo-Liberal) yang akhirnya membuat Indonesia tidak berdaya karena mengadopsi teori ini pada saat pemerintahan rezim orde baru adalah teori yang diusung Walt .W. Rostow dengan Teori Pertumbuhan Tahapan Linear (*linear-stages-of growth- models*). Menurut teori ini, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Oleh Rostow, proses pembangunan dibagi ke dalam lima tahap yaitu: Masyarakat Tradisional, Prakondisi Lepas Landas, Lepas Landas, Bergerak ke kedewasaan, Konsumsi Massal yang Tinggi (Arief Budiman, 1995:25-28).

Konsepsi *development* terus berkembang dan mengalami masa keemasannya karena banyak negara-negara Dunia Ketiga yang sangat diidentikan dengan masalah kemiskinan, korupsi, kriminalitas berlomba-lomba mengadopsi dan berusaha mengimplementasikan teori-teori modernisasi kolompok kapitalis ini secara mentah-

mentah tanpa adanya agregasi/artikulasi atau proses negosiasi untuk melakukan filterisasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukannya. Akibatnya *development* (pembangunan) atau modernisasi disadari hanya menguntungkan negara-negara maju seperti Amerika dan sekutunya sebagai pemilik modal dan sebaliknya modernisasi hanya membawa malapetaka dan kehancuran ekonomi bagi negara-negara miskin dan terbelakang (negara Dunia Ketiga) seperti yang telah dirasakan oleh Indonesia saat ini.

Pembangunan, seperti kata Truman merupakan resep bagi negara berkembang dalam membangun dirinya melewati masa transisi dekolonisasi menuju demokrasi, ternyata menurut pengamatan Wolfgang Sachs dan kawan-kawan dianggap banyak kelemahan. Sejumlah kelebihan pembangunan terjadi berkaitan dengan tragedi kemanusiaan dan permasalahan kelestarian lingkungan. *"Today, the lighthouse of development shows cracks and is starting to crumble. The idea of the development stands like a ruin in the intellectual landscape. Delusion and disappointment, failures and crimes have been the steady comparisons of development and they tell a common story: it did not work. Moreover, the historical conditions with catapulted the idea into prominence have vanished: development has become outdate. But above all, the hopes and desires which made the idea fly, are now exhausted: development has grown absolute"* (Sachs, 1995 dalam tulisan Baiquni:2002).

Kecaman dan kritik terhadap konsepsi *development* atau modernisasi terus lahir dari ilmuwan-ilmuwan atau tokoh-tokoh yang tidak sepaham dengan konsep pembangunan ini, bagi mereka teori modernisasi yang diusung oleh konsep *development*. Gustavo Esteva (1992) menyatakan bahwa banyak para teoretisi *Dependencia* dari Amerika Latin dan intelektual kritis lainnya menuding "keterbelakangan sebagai wujud pembangunan". Menurut mereka, keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga akibat proses penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan dengan cara dan tolok ukur keberhasilan yang dirumuskan negara maju, dalam penerapannya seringkali tidak tepat dengan kondisi dan dinamika local. Pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, seringkali dapat berbenturan dengan kepentingan masyarakat luas yang menginginkan keadilan dan keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan angka ternyata telah gagal menggambarkan peningkatan pemerataan yang diharapkan. Kesenjangan terjadi diberbagai kalangan masyarakat sementara sekelompok kecil konglomerat menguasai sebagian besar asset produktif. Bahkan bila dihitung dengan *Green Growth Model*, angka pertumbuhannya akan terkoreksi menjadi lebih kecil dibanding dengan angka pertumbuhan ekonomi yang sering dilansir oleh pemerintah kepada public (dalam Baiquni, 2002:26).

Azizy (2003:44), menyatakan bahwa sesungguhnya membicarakan liberalisme tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kapitalisme dan pasar bebas. Karena kapitalisme merupakan system ekonominya, yang intinya adalah terdapat *sphere* luar biasa yang diberikan kepada individu untuk berkompetisi dalam meraih keuntungan secara ekonomi (pasar bebas) dan minimalisasi peran *state* dalam area tersebut. Dengan munculnya konsep neo-liberal oleh Milton Friedman dan Frederick Von Hayek dari Chicago University, sekaligus menandai kemunculan globalisasi di bidang ekonomi dan teknologi informasi.

Dalam teori ketergantungan, Theotonio Dos Santos melihat dampak dari pembangunan adalah lahirnya ketergantungan dari negara-negara pinggiran kepada negara-negara pusat dalam hubungan system ekonomi atau lebih. Dos Santos melihat bahwa ada ketergantungan negara-negara pinggiran terhadap kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju. Negara-negara pusat bisa berkembang secara mandiri. Kalau ekonomi mereka sedang bergerak maju, bisa terjadi bahwa ekonomi negara-negara pinggiran juga bisa ikut bergerak maju. Tetapi, bila negara-negara pusat sedang mengalami kesulitan, sudah dapat dipastikan bahwa negara-negara pinggiran akan mengalami kesulitan. Karena ekonomi negara pinggiran tergantung pada ekonomi negara-negara pusat. Kritik lebih keras datangnya dari Andre Gunder Frank, bagi Frank hubungan negara pinggiran dengan negara pusat pasti menghasilkan apa yang disebut sebagai *pembangunan keterbelakangan* atau *the development of underdevelopment*. Satu cara bagi negara-negara pinggiran untuk maju: putus hubungan dengan negara pusat. Frank melihat bahwa kapitalisme, baik yang global maupun nasional, adalah factor yang telah menghasilkan keterbelakangan di masa lalu dan yang terus mengembangkan keterbelakangan di masa sekarang (Arief Budiman, 1995:63-65).

Dari ulasan tentang lahirnya konsep *development* atau modernisasi yang sarat dengan nilai-nilai liberalisme-kapitalisme (neo-liberalisme), serta dampaknya bagi negara-negara tertinggal (negara Dunia Ketiga), lahirlah pertanyaan untuk mengulas dampak pembangunan atau modernisasi yang digulirkan kaum kapitalisme bagi Bangladesh (sesuai pokok bahasan materi *summery* dan *critical review*) dan kaitannya dengan kondisi Indonesia saat ini.

Kaitannya dengan Indonesia, John Pilger pada tahun 2001 menghebohkan Indonesia (bahkan dunia internasional) melalui laporan khususnya (*special report*) yang dikemas dalam sebuah film dokumenter yang di beri judul "*The New Rulers of the World*". Dalam laporan khusus tersebut, Pilger mengulas tentang sepak terjang penguasa baru dunia yang merupakan lembaga/agen dari negara-negara maju yang menganut paham liberalisme-kapitalisme yakni *United Nations*, *World Bank* (Bank Dunia), *International Monetary Fund* (IMF) yang semua dimotori oleh Amerika Serikat dan dampaknya bagi negara-negara berkembang atau negara-negara miskin terutama bagi sebuah negara yang oleh Amerika dan kroni-kroninya disebut sebagai "*secercah cahaya di Asia*" pada awal keterlibatannya yakni Indonesia.

Pilger menyatakan bahwa, Indonesia sebuah negeri yang tidak sepatutnya miskin, karena Indonesia kaya akan segalanya, mulai dari gunung emas dan tembaga, minyak bumi, kayu, dan keterampilan serta tenaga kerja yang tersedia. Namun pada kenyataannya di negeri yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya yang melimpah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini, terdapat 70 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Ironis dan dilematis, namun itulah kondisi dan kenyataan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini.

Jika demikian, tentu saja orang akan bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan hingga Indonesia bisa terjerumus dalam jurang kemiskinan? Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah (para pemimpinnya) sehingga rakyat Indonesia

menjadi miskin? Kemana saja pembangunan yang selama ini dilaksanakan? dan sederet pertanyaan yang dikemukakan untuk kondisi yang di hadapi oleh Indonesia.

Jika dikaji dari laporan yang disampaikan oleh Pilger atau pernyataan yang dikemukakan oleh Roland Challis (BBC SE Asia Corespondent 1964-69 (dalam *The New Rulers of the World*) dan dikaitkan dengan keterpurukan yang dialami Indonesia dalam membangun sebuah negara yang adil dan makmur, negara yang mandiri, kuat dan berdaulat, dimulai sejak beralihnya kekuasaan melalui proses kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto kepada Jenderal Ahmad Soekarno pada pertengahan tahun 1960-an yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dengan bantuan dari Amerika dan Inggris. Bagi negara-negara liberalisme-kapitalisme, Soekarno adalah sosok yang sangat dibenci dan harus disingkirkan karena Soekarno merupakan ancaman bagi mereka. Perasaan Soekarno yang sangat membenci Amerika dan sekutu-sekutunya tidak memberikan kesempatan dan tempat bagi liberalisme-kapitalisme untuk menanamkan cakarnya di Indonesia, Soekarno mengusir perusahaan-perusahaan asing dari Indonesia dan juga mendepak keluar Bank Dunia dan IMF karena keyakinannya bahwa Indonesia mampu mencapai kemandirian dalam membangun perekonomiannya tanpa campur tangan pihak asing.

Dengan lengsernya kekuasaan Soekarno dan berkuasanya Jenderal Soeharto dalam sebuah rezim yang terkenal sangat militeristik dan otoriter, sejak saat itu ekonomi Indonesia dirancang ulang di Amerika Serikat, Soeharto juga membuka akses negara-negara maju terhadap semua kekayaan dan potensi yang dimiliki Indonesia mulai dari kekayaan mineral hingga pasar tenaga kerja yang murah sebagai bagian dari "perjanjian".

Clifford Geertz seorang Antropolog Amerika dalam suatu percakapan dengan Soeharto pernah mengingatkan agar Indonesia yang sangat beragam suku dan budayanya serta sangat religious, hendaknya tidak memilih menjalankan demokrasi liberal, karena itu akan menghancurkan negara dan itulah kenyataan yang telah melanda Indonesia¹.

Dalam film "*The New Ruler of the World*", kesepakatan atau perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan Amerika atau Inggris, sebenarnya merupakan awal dari sebuah kehancuran bagi Indonesia dan bentuk lain dari penjajahan untuk kedua kalinya oleh kaum kolonialisme dalam era kemerdekaan yang telah di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kurang lebih 3,5 abad dijajah secara jasmani dan rohani. Akibat gerbang modernisasi dibuka oleh Soeharto, perusahaan-perusahaan multinasional menginvestasikan modal mereka di Indonesia dan menjalankan usaha mereka untuk memproduksi barang-barang bermerek mulai dari pakaian bayi sampai produk olah raga seperti *GAP KIDS*, *NIKE*, *REEBOC CLASSIC*, *CALVIN KLEIN JEANS*, *LEVIS*, *ADIDAS*, dan lain-lain yang dipasarkan di pasar global atau mancanegara dengan harga yang hanya dapat dibeli oleh kaum borjuis atau orang-orang kaya dengan membayar upah yang sangat murah kepada karyawannya seperti 4 sen atau Rp 500,-

¹ <http://mhshyam.wordpress.com/2009/07/25/engaruh-globalisasi-terhadap-kedaulatan-negara/>

dimana uang tersebut tidak sebanding dengan nilai kontrak yang dibayarkan kepada seorang mega bintang dalam mempromosikan produk-produk tersebut.

Dalam pengoperasian atau menjalankan usahanya, keuntungan berlipat ganda secara finansial adalah prioritas sedangkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja tidak diperhatikan. Perusahaan-perusahaan multinasional ini cenderung tidak memperhatikan kode etik perusahaan, sehingga nilai para pekerja tidak lebih dari sebuah mesin hidup yang harus terus bekerja memproduksi barang sedangkan harga diri sebagai manusia hanyalah dianggap sebagai budak pekerja yang tidak ada nilainya. Globalisasi sebagai era yang diharapkan membawa pemerataan kesejahteraan di berbagai negara karena tidak adanya batas-batas teritorial dalam aktivitas ekonomi termasuk Indonesia, ternyata hanyalah sebuah desain yang mempecundangi Indonesia sebagai negara berkembang oleh negara-negara maju karena kenyataannya globalisasi bukannya membawa pemerataan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia justru yang terjadi adalah kemelaratan, kemiskinan, ketimpangan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat aktivitas ekonomi untuk meningkatkan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui investasi-investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan nasional tersebut.

Menurut Amartya Sen (2001) dalam bukunya yang berjudul "*Masih Adakah Harapan bagi Kaum Miskin?*", melihat fenomena dan dinamika kemiskinan yang terjadi di India dan Bangladesh dimana tidak adanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di sebabkan oleh kerakusan dan keserakan para pelaku ekonomi yang tidak melihat pentingnya nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi dan pasar. Pengusaha kaya raya yang memiliki perusahaan-perusahaan multinasional bekerjasama dengan lembaga keuangan dan dominasi sepihak dari negara-negara kaya yang memaksakan kehendaknya secara politis kepada negara-negara miskin dan negara-negara berkembang, telah membawa penderitaan serta menjerumuskan negara lemah yang tidak memiliki kekuatan atau pilihan terjat dalam politik utang luar negeri yang telah dirancang oleh negara besar dan kuat.

Kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih banyak mengkomodir kepentingan kaum kapitalis, akhirnya membuat Indonesia terjat terjat dalam jaring laba-laba yang dibangun oleh penguasa baru dunia yaitu IMF dan *World Bank* sehingga kapitalisme tumbuh dengan subur dan menguasai seluruh sendi-sendi perekonomian negara akibatnya terjadi monopolistik, kuatnya intervensi negara maju dalam aktivitas pasar dan kebijakan-kebijakan negara.

Di Indonesia selama rezim orde baru, kode etik (etika ekonomi) perusahaan yang dibuat guna menetapkan standarisasi dan perlindungan kepada para buruh atau para pekerja tidak berlaku karena pemerintah senantiasa mensosialisasikan murahness harga buruh di Indonesia untuk menarik minat para investor asing sehingga kode etik yang dapat melindungi hak-hak buruh yang miskin tidak bermanfaat dan tidak dapat merubah apapun, akibatnya di negeri yang begitu kaya raya ternyata dihuni oleh berjuta-juta penduduk miskin yang turut dipengaruhi oleh keegoisan kaki tangan kapitalis yang

berkuasa yang didukung oleh kebijakan-kebijakan para pemimpin yang sangat militeristik dan otoriter guna melindungi kepentingan pihak asing.

Lemahnya posisi pekerja atau buruh selama ini ternyata turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang telah menyerahkan rancangan dan kebijakan ekonomi kepada negara maju dalam hal ini IMF dan Bank Dunia karena banyaknya utang luar negeri yang dilakukan selama pemerintahan rejim orde baru. Kehadiran IMF dan Bank Dunia di Indonesia ternyata tidak membawa solusi untuk kemajuan Bangsa Indonesia justru sebaliknya kemelaratan, penderitaan, kemiskinan dan utang yang jumlahnya trilyunan rupiah yang didapati oleh Indonesia. Dengan posisi yang begitu sulit akibat tingkat ketergantungan yang begitu kuat kepada IMF dan Bank Dunia sebagai agen negara maju terutama Amerika, pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia susah melepaskan diri dari cengkraman negara kapitalis karena memang tidak ada pilihan lain selain mengikuti alur atau permainan yang telah dikonsepsikan oleh paham kapitalis karena memutuskan hubungan dengan negara maju dan mengisolasi diri dari modernitas seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, sangat mustahil atau tidak mungkin dilakukan oleh Indonesia.

Selain kerusakan lingkungan yang dialami akibat operasionalisasi kegiatan perekonomian antara Indonesia dan agen-agen kapitalis, misalnya kerusakan lingkungan yang dialami akibat kegiatan penambangan bahan mineral, eksploitasi sumber-sumber hutan dan laut, masalah lain yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah kemiskinan rakyatnya. Jika dikaitkan antara kondisi bangsa Indonesia dengan teori ketergantungan yang diusung oleh Dos Santos maupun Gunder Frank, terdapat tingkat ketergantungan yang begitu tinggi dari Indonesia kepada negara-negara maju dan besar. Ketergantungan ini dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam mengadopsi isu-isu globalisasi yang dilemparkan oleh negara-negara maju untuk tetap menjaga keberlangsungan kekuasaannya, misalnya keikutsertaan Indonesia dalam proyek MDG's, diadopsi dan dilaksanakannya ide *good governance* dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Dalam teori Harrod-Domar, yang menjadi fokus perhatiannya adalah pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi. Satu hal yang tidak mendapatkan perhatiannya adalah unsur manusia. Tidak diperhitungkannya unsur manusia ini sebenarnya merupakan kelemahan dari teori Harrod-Domar selain konsep pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi. Akibat diadopsinya teori ini, Indonesia dalam upaya meningkatkan tabungan dalam negerinya agar mampu terlibat dalam kegiatan-kegiatan perekonomian dan pasar global, Indonesia juga melakukan pinjaman modal investasi kepada IMF dan Bank Dunia, Indonesia terus melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang dimilikinya baik SDA maupun SDM, dan sebagai syarat atas perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia adalah privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik pemerintah kepada pihak swasta (asing) serta mengizinkan negara-negara maju untuk membuka dan mengoperasikan industri-industri mereka di Indonesia bahkan menjadikan Indonesia sebagai pasar dalam kegiatan perekonomian mereka dan itu merupakan upaya untuk

meningkatkan tabungan dan investasi guna mencapai pembangunan ekonomi dalam negeri tanpa memperhitungkan unsur manusia Indonesia secara utuh.

Tidak diperhitungkannya unsur manusia dalam kegiatan pembangunan ekonomi melalui tabungan dan investasi, kualitas dan kapasitas orang Indonesia untuk membangun dirinya sangat lemah sekali. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, para pemimpin negeri ini, terutama kaum intelektual yang telah terdokrinasikan oleh pemahaman kapitalisme, lebih memaksakan ide-ide mereka tentang pembangunan kepada rakyat yang lemah dalam hal pendidikan dan pengetahuan. Nilai-nilai sosial yang menjadi ideologi atau kekhasan negara terlupakan bahkan identitas diri sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat pun dilupakan demi untuk memperoleh kekayaan sepihak dengan mengorbankan nasib orang banyak. Lemahnya orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengakibatkan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya baik secara fisik maupun dalam hal kebebasan berpikir (*liberation of mind*) tidak mampu dilakukan. Pengembangan kemampuan diri, pengembangan kapasitas manusia untuk mencapai suatu kemampuan dalam memahami dirinya agar mampu terlibat secara optimal dalam proses pembangunan inilah yang dilupakan oleh Harrod-Domar sehingga orang menjadi terkekang, tidak bebas mengemukakan ide-idenya, martabat seseorang sebagai manusia dikesampingkan sehingga dalam proses pembangunan ekonomi bukan kapasitas/kemampuan diri, martabat sebagai manusia, kemakmuran, kesejahteraan, kebebasan (fisik/pikiran) yang diperoleh melainkan keterpurukan, penderitaan dalam kemiskinan.

People's self-development, yang mengulas tentang betapa pentingnya nilai kebebasan orang dalam hal berpikir maupun menentukan pilihan dalam pengembangan pemahaman dirinya, oleh Amartya Sen (1999) dalam tulisannya "*Development As Freedom*", mengatakan industrialisasi atau kemajuan teknologi atau modernisasi sosial dapat memberi kontribusi pada perluasan kebebasan manusia, tetapi kebebasan bergantung pada pengaruh lain juga. Jika kebebasan adalah apa kemajuan pembangunan, maka ada argumen utama untuk mengkonsentrasikan pada tujuan yang menyeluruh, bukannya pada sarana tertentu, atau daftar instrumen yang dipilih secara khusus. Memandang pembangunan dalam pengertian kebebasan substantif yang meluas mengarahkan perhatian sampai akhir yang membuat pembangunan penting, bukannya semata pada beberapa sarana yang memainkan bagian penting dalam proses itu.

Selain teori Harrod-Domar, dalam melaksanakan pembangunan terutama pada era orde baru, Indonesia juga mengadopsi dan mempraktekkan teori W.W. Rostow tentang lima tahap pembangunan. Dalam lima tahap pembangunan ini Indonesia berusaha merubah "image" dari negara miskin pasca kolonial yang rakyatnya masih tradisional untuk menjadi negara modern yang terbebas dari bayang-bayang kemiskinan dan sifat *ansifilise*. Dalam melahirkan teori ini, Rostow lupa bahwa dunia ini selalu berputar, terus mengalami perubahan dan berkembang. Sebenarnya orang atau negara tidak perlu melalui rell atau jalur (tahap-tahap dalam pembangunan) karena sebenarnya orang mampu membangun negaranya dengan melihat dan belajar dari orang lain tanpa adanya tekanan dan intervensi yang kuat dari negara lain. Teori Rostow yang

menganjurkan agar orang harus melewati tahapan-tahapan dalam membangun negerinya ini akhirnya terbukti menghancurkan banyak negara karena berusaha untuk lepas dari kehidupan masyarakat tradisional yang dicirikan dengan masyarakat pertanian, ilmu pengetahuannya terbatas, mempercayai adanya kekuatan-kekuatan dari luar atau masih bersifat konsumtif menuju tahap konsumsi massal yang tinggi.

Upaya Indonesia untuk lepas dari masyarakat tradisional inilah yang sebenarnya menurut kami menghancurkan Indonesia, karena Indonesia berusaha untuk merubah tradisi atau nilai-nilai kearifan local yang merupakan sumber kehidupan rakyatnya yaitu sebagai petani tradisional. Para pemimpin negeri ini seolah-olah lupa atau sengaja pura-pura tidak tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sejak dahulu menggantungkan hidupnya pada sector agraris (sector pertanian/perkebunan sebagai petani atau pada sector kelautan sebagai nelayan). Seharusnya dalam membangun negeri ini, Indonesia lebih menitikberatkan perhatiannya pada sector agraris yang sangat menunjang dan memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia karena Indonesia memiliki potensi agraris yang luar biasa melimpah.

Keinginan Indonesia untuk merubah tradisi atau pola hidup masyarakat Indonesia yang senantiasa bergantung pada sector pertanian menjadi masyarakat industry justru membawa Indonesia pada posisi kehancuran. Saat ini kita tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah negara agraris karena tidak ada produk agraris Indonesia yang dapat kita banggakan, kita mau mengatakan Indonesia adalah negara pertanian sedangkan beras saja masih didatangkan dari Thailand dan Vietnam, kita tidak bisa mengandalkan industri kita karena tidak ada produk industri yang harus kita banggakan pula.

Nilai-nilai kearifan lokal yang terlupakan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi negara inilah yang telah membawa Indonesia dalam keterpurukan pembangunan di era modernisasi. Tidak adanya penguatan terhadap kapasitas masyarakat local dan nilai-nilai kearifan yang dianutnya sebagai suatu identitas yang menjadi kekuatan negara terabaikan. Indonesia terlalu terdokrinasasi dengan paham kapitalis yang melihat manusia berdasarkan struktur dan tingkatan sehingga kehancuran dan ketertinggalan yang diraih dalam usaha pembangunan negaranya.

Dengan melihat kondisi masyarakat yang demokratis dan semakin kritis di era reformasi ini, pemerintah saat ini harus mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dimasa lalu dan juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negaranya sendiri, mengingat betapa berat penderitaan yang harus ditanggung oleh generasi Indonesia masa kini atas keegoisan dan kerakusan akan sebuah kekuasaan rejim dimasa lalu. Peran yang harus dimainkan oleh negara saat ini adalah mulai memproteksi hak-hak masyarakat Indonesia dengan memperbaiki kinerjanya, meningkatkan kualitas aparatur birokrasi, meningkatkan profesionalitas dalam kepemimpinannya, lebih berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan mengenyampingkan kepentingan sepihak (keluarga, kelompok atau parpol), mereformasi tata pemerintahannya agar lebih efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan pemerintahan serta memperbaiki tata kelola administrasi negaranya dalam menghadapi tantangan globalisasi

Pemerintah juga harus berusaha untuk memperbaiki kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk suatu kehidupan yang layak melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tanpa campur tangan pihak asing. Hal ini dilakukan mengingat keterlibatan pihak asing di dalam membuat regulasi atau kebijakan negara Indonesia cenderung untuk kepentingan negara mereka tanpa memikirkan nasib dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kekangan-kekangan atau tindakan-tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kepada serikat pekerja atau serikat buruh yang memprotes perlakuan yang tidak adil oleh pihak perusahaan harus dihentikan dan sebaliknya pemerintah harus membuat aturan atau kebijakan yang melindungi hak-hak dasar pekerja dan buruh guna memperbaiki kesejahteraan hidup mereka.

3. Penutup

Dalam konteks pembangunan atau pengembangan diri masyarakat Indonesia, harus dimulai dengan meningkatkan pemahaman terhadap diri masyarakat Indonesia bahwa kebebasan dalam hal berpikir adalah hal yang utama untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sesungguhnya sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Dalam wacana *People Self-Development*, pengembangan kapasitas dan personalitas dapat membawa masyarakat keluar dari kemerosotan dan kemiskinan serta mengembangkan atau membangun ekonomi rakyat berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya bukan sekedar memaksakan sebuah konsep, teori atau isu yang dilemparkan dunia internasional tanpa ada proses artikulasi dan negosiasi terlebih dahulu.

Selain itu, peran pemerintah juga dapat dimainkan melalui penguatan kapasitas masyarakat melalui nilai-nilai *local wisdom* atau kearifan lokal, nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah melalui otonomi daerah (desentralisasi pemerintahan), pemerintah daerah diharapkan mampu berkreasi dan berinovasi untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah guna menghidupkan sentra-sentra produksi ekonomi lokal/masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah pemerintahannya. Keberhasilan yang telah di raih oleh DR. IR. Fadel Muhammad semasa memimpin Provinsi Gorontalo, atau keberhasilan yang telah diraih oleh Edward Fonataba ketika memimpin Kabupaten Sarmi, keberhasilan Habel Melkias Suwae ketika memimpin Kabupaten Jayapura atau beberapa daerah propinsi/kabupaten di Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan penduduk di era otonomi daerah (Provinsi DIY, Kabupaten Jembrana Bali, dll) merupakan harapan-harapan dalam kebijakan yang telah dilakukan untuk merubah kehidupan masyarakat agar mampu dan mandiri sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.

Dalam teori-teori modernisasi satu hal yang terlupakan adalah bahwa pembangunan tidak selamanya harus dilakukan dari atas dan bukan hanya sekedar mengejar

pertumbuhan pada sektor ekonomi semata, pembangunan juga dapat dilakukan dari bawah dengan memberdayakan masyarakat lokal, penguatan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpikir dan menentukan tekadnya dalam membangun masyarakat dan dirinya. Ife & Tesoriero (2006), mengatakan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan ia untuk mengemukakan pendapatnya, ia mempunyai kesempatan yang sama dengan orang lain untuk berpartisipasi karena kekuasaan yang ada tersebar secara merata di antara sejumlah kelompok yang berbeda dan berkompetisi. Melalui pemberdayaan sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan, diharapkan masyarakat Indonesia yang hidup dibawah kemiskinan dapat bangkit dengan kapasitas yang dimilikinya agar mampu berpartisipasi dan memankan perannya sebagai bagian dari proses pembangunan itu bukan lagi sebagai penonton atau terlebih sebagai korban dari sebuah pembangunan.

4. Daftar Pustaka

- Azizy Qodry, 2003, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan dan terciptanya Masyarakat Madani)*, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baiquni M., 2002, *Integrasi Ekonomi dan Ekologi: Dari Mimpi Menjadi Kenyataan*, Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XII; dalam Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan serta Kumpulan Referensi, Program MAP-UGM, Yogyakarta.
- Budiman Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta.
- Fakih Mansour, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ife Jim & Tesoriero Frank, 2006, *Community Development: Community-Based Alternative in a Age of Globalisation*, Unit 4, Level 3, 14 Aquatic Drive Frenchs Forest NSW 2086., Pearson Education Australia.
- Pilger John, 2001, *The New Rulers of the World; Special Report* (Documenter Film), OASIS Television, London.
- Rahman Anisur MD, *People's self-development: Perspectives on participatory action research: A Journey through Experience*, Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam GB.
- Sen Amartya, 2001, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*, Mizan, Bandung.
- , 1999, *Development as Freedom*, Alfred A. Knoff, New York.

Website :

<http://mhস্যam.wordpress.com/2009/07/25/engaruh-globalisasi-terhadap-kedaulatan-negara/>